

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aminuddin, I. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenada Media.
- Daryanto, D. 2007. *Energi: Masalah dan Pemanfaatannya Bagi Kehidupan Manusia*. Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- Hardjono, A. 2001. *Teknologi Minyak Bumi*, Edisi Pertama. Yogyakarta: UGM Press.
- Hatta, M., Abdulgani, R., & Saleh, M. 1977. *Penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Mutiara.
- Manan, B., Mashudi, & Magnar, K. 1995. *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*. Bandung: Mandar Maju.
- Marbun, S. F. 2012. *Hukum Administrasi Negara I*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, P. M. 2007. *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cet. Ketiga, Jakarta: Kencana.
- Salim, H. S. 2005. *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Soemitro, R. H. 1982. *Metodologi Penelitian. Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Sutedi, A. 2011. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suteki, G. T. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Syarifin, P., Jubaedah, D., & Subadra, C. 2005. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Triwibowo, D., & Bahagijo, S. 2006. *Mimpi Negara Kesejahteraan*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia
- Voll, W. D. 2017. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yamin, M. 1959. *Naskah Persiapan UUD 1945: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI*. Jakarta: Sekretariat Negara RI

Peraturan Perundang – Undangan :

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional
4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*
5. Peraturan Menteri ESDM Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*
6. Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*

Karya Ilmiah, Jurnal dan Lain – lain:

- Giranza, M. J., & Bergmann, A. 2018. *Indonesia's New Gross Split PSC: Is It More Superior Than the Previous Standard PSC*. Journal of Economics, Business and Management, 6.
- Gross, S. G. 2002. *Inordinate Chill: Bits, Non-NAFTA Mits, and Host-State Regulatory Freedom-An Indonesian Case Study*. Mich. J. Int'l L., 24, 893.
- Hermansyah. 2017. *Peran Daerah dalam Perencanaan Energi Nasional*. Jurnal Mineral dan Energi. 15(1).
- Hernandoko, A., & Imanullah, M. N. *Implikasi Berubahnya Kontrak Bagi Hasil (Product Sharing Contract) Ke Kontrak Bagi Hasil Gross Split Terhadap Investasi Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia*. Jurnal Privat Law, 6(2), 160-167.

- Nalle, V. I. W. 2016. *Kedudukan Peraturan Kebijakan dalam Undang-undang Administrasi Pemerintahan*. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 10(1), 1-16.
- Nugraha, S. 2002. *Privatisation of State Enterprises in the 20th Century: A Step Forwards Or Backwards?: a Comparative Analysis of Privatisation Schemes in Selected Welfare States* (Doctoral dissertation, Rijksuniversiteit te Groningen).
- Pramadika, H., & Satiyawira, B. 2019. *Pengaruh Harga Gas dan Komponen Variabel terhadap Keuntungan Kontraktor pada Gross Split*. PETRO: Jurnal Ilmiah Teknik Perminyakan, 7(3), 113-117.
- Putuhena, M. I. F. 2015. *Politik Hukum Pengelolaan Hulu Migas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 4(2), 237-253.
- Prasetyo, K. F. 2016. *Politik Hukum Di Bidang Ekonomi Dan Pelembagaan Konsepsi Welfare State Di Dalam Undang-Undang Dasar 1945*. Jurnal Konstitusi, 9(3), 495-514.
- Qurbani, I. D. (2012). *Politik Hukum Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Di Indonesia*. Arena Hukum, 5(2), 115
- Rachman, I. N. 2016. *Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33 UUD 1945*. Jurnal Konstitusi, 13(1), 195-212.
- Redi, A. 2016. *Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam*. Jurnal Konstitusi, 12(2), 401-421.
- Ruslina, E. 2016. *Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia*. Jurnal Konstitusi, 9(1), 49-82.
- Sa'adah, A. F., Fauzi, A., & Juanda, B. 2017. *Peramalan Penyediaan dan Konsumsi Bahan Bakar Minyak Indonesia dengan Model Sistem Dinamik*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, 17(2), 119
- Soenabto, A., Ratnasari, AD.. 2017. *9 Fenomena Hulu Migas Indonesia; Peluang Memperbaiki Iklim Investasi dengan Kontrak Migas "Gross Split"*. Buletin SKK Migas, 2.
- Sukmana, O. 2016. *Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan*. Jurnal Sospol, 2(1), 102-120.

- Sumbu, T. 2010. *Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 17(4), 567-588.
- TR, C. A. H. 2016. *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Regulasi Production Sharing Contract*. Jurnal Konstitusi, 9(4), 597-612.
- Van der Vlies, I. C., & Doludjawa, L. 2005. *Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-Undangan*. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Volta, G. D. M., & Kafabih, F. 2015. *Reformulasi Sistem Bagi Hasil Melalui Kontrak Bagi Produksi Guna Mewujudkan Kedaulatan Migas*. Panggung Hukum, 1(1).